



**PERKEMBANGAN BIOSKOP DI KOTA SEMARANG
TAHUN 1980-1998**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

UNNES
Oleh :
Abna Dian Fitriani
3111413017
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

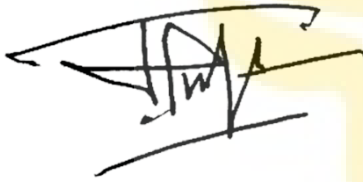
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15 November 2017

Pembimbing I



Drs. Jayusman, M.Hum.
NIP. 19630815 198803 1 001

Pembimbing II



Atno, S.Pd., M.Pd.
NIP.19851201 201504 1 002

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui:
Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd.
NIP. 19640605 198901 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22 November 2017

Penguji I



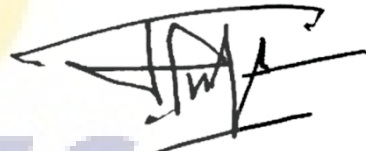
Arif Purnomo, S.Pd, S.S, M.Pd.
NIP. 19730131 199903 1 002

Penguji II



Atno, S.Pd., M.Pd.
NIP.19851201 201504 1 002

Penguji III



Drs. Jayusman, M.Hum.
NIP. 19630815 198803 1 001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



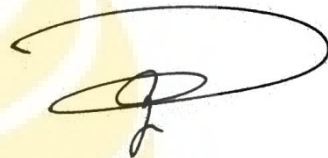
Drs. Moh Solehatul Mustofa, M.A.

NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 22 November 2017



Abna Dian Fitriani
NIM. 3111413017



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Be Simple, Different, Special

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah skripsi yang telah selesai ditulis dan dipertanggungjawabkan di depan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang ini saya persembahkan kepada:

1. Bapakku Ageng Budiono (Alm) dan Ibuku Khasanah, yang yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan.
2. Adikku tersayang Nada Putri Huwaida yang selalu menyemangatiku.
3. Teman-teman rombel Ilmu Sejarah 2013 (SOHU) yang telah mewarnai haru biru perjalanan hidupku.
4. Keluarga besar Bani Moch Djaan, terima kasih atas segala bantuan dan motivasinya.
5. Sahabatku Ova, Sinta, Ifah, Dewi, dan Bobi yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah dan menemani selama penelitian.
6. Keluarga kost Mukri, Mbak Nisak, Mbak Ayu, Mbak Tutut, Mbak Dila, Mbak Destria, Mbak Novi, Mbak Rani, Mbak Yaya dan Anggun yang telah mewarnai hari-hari selama menjadi anak kos, terimakasih semangatnya.
7. Almamater kebanggaan.

PRAKATA

Segala puji kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada penulis dalam setiap waktu. Hanya berkat pertolongan dan kuasa-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Perkembangan Bioskop di Kota Semarang Tahun 1980-1998” sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

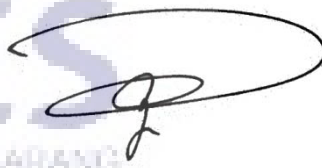
1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
3. Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd., Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
4. Drs. Jayusman, M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan saran dan motivasi kepada penulis.
5. Atno, S.Pd., M.Pd., Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan saran dan motivasi kepada penulis.

6. Seluruh bapak/ ibu dosen Jurusan Sejarah yang telah banyak mentransferkan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh staff dan karyawan Jurusan Sejarah yang telah turut membantu penulis dalam menempuh studi.
8. Semua pihak yang telah membantu seperti Sinematek Indonesia (Ardian), Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dewan Kesenian Semarang (Agus Priyo Hatmoko), Depo Arsip Suara Merdeka, Kwitang 14 (Juju), Tubagus P Svarajati, Djawahir Muhammad, dan Jongkie Tio yang telah memberikan informasi yang sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

Semoga semua budi baik yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Demikian besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 22 November 2017

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Abna Dian Fitriani

NIM. 3111413017

SARI

Fitriani, Abna Dian. 2017. *Perkembangan Bioskop di Kota Semarang Tahun 1980-1998*. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Jayusman, M. Hum., Pembimbing II Atno, S. Pd., M. Pd..

Kata Kunci : Perkembangan Bioskop, Semarang

Secara umum bioskop dan film merupakan salah satu hiburan yang populer dan murah. Bioskop dapat diartikan sebagai gedung tempat pemutaran film untuk umum yang dipungut biaya. Awalnya di Indonesia bioskop pertama kali diperkenalkan di Batavia pada tahun 1900. Keberadaan bioskop merupakan suatu hal yang baru dan menarik dalam dunia hiburan sehingga bioskop banyak diminati oleh masyarakat, begitupula di Kota Semarang. Bioskop dan film merupakan hiburan yang banyak digemari masyarakat Kota Semarang sejak tahun 1922 hingga akhir abad ke-20. Tujuan dari penelitian ini antara lain (1) Untuk mendeskripsikan latar belakang berdirinya gedung bioskop di Kota Semarang (2) Untuk mendeskripsikan perkembangan bioskop di Kota Semarang tahun 1980-1998 dan (3) Untuk menganalisis pengaruh adanya bioskop terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian sejarah yaitu (1) Heuristik, (2) kritik sumber, (3) interpretasi, dan (4) historiografi. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan data yang berupa data tertulis dan dokumen berupa foto, arsip, dan sumber lisan dari hasil wawancara dengan saksi sejarah.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan bioskop di Kota Semarang mengalami kemajuan dari tahun 1922 yang hanya 2 bioskop hingga tahun 1984 tercatat sebanyak 22 bioskop. Perkembangan bioskop di Semarang didukung oleh adanya enam distributor film yang terdapat di Kota Semarang yang tidak hanya mendistribusikan film di bioskop-bioskop Kota Semarang saja namun juga ke daerah sekitar Semarang antara lain Surakarta. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat perkembangan bioskop di Kota Semarang yaitu adanya perkembangan televisi swasta yang menyajikan rubrik bioskop dan juga maraknya VCD dan DVD bajakan yang harganya tidak lebih dua kali lipat harga tiket bioskop.

ABSTRACT

Fitriani, Abna Dian. 2017. *The Development of Cinema in Semarang 1980-1998.* Final Project. Department of History. Faculty of Social Sciences. Universitas Negeri Semarang. Supervisor I Drs. Jayusman, M. Hum., Supervisor II Atno, S. Pd., M. Pd..

Keywords: Development of Cinema, Semarang

In general, cinema and film are kinds of the popular and cheap entertainments. Cinema can be interpreted as a public paid movie screening facility. Initially, in Indonesia cinema was first introduced in Batavia in 1900. The existence of cinema is a new and exciting thing in the world of entertainment so that cinema has great demand in the community, as well as in the city of Semarang. Cinemas and movies are entertainment that much-loved by the people of Semarang since 1922 until the end of the 20th century. The purpose of this research is (1) To describe the background of cinema in Semarang (2) To describe of cinema development in Semarang in the period of 1980-1998 and (3) To analyze the influence of cinema to social economic life of Semarang society.

The research method used is a method of historical research includes (1) Heuristic, (2) source critic, (3) interpretation, and (4) historiography. Data collection techniques researchers use data in the form of written data and documents in the form of photos, archives, and oral sources of interviews with witnesses of history.

The results of this study can be concluded that the development of cinema in Semarang progressed from the year 1922 with only 2 cinemas until the year 1984 recorded as many as 22 theaters. The development of cinema in Semarang is supported by six film distributors located in Semarang that does not only distribute films in Semarang cinemas but also expanded to Semarang area such as Surakarta. While the factors that hamper the development of cinema in the city of Semarang is the development of private television that presents the cinema section and also the rise of pirated VCDs and DVDs that cost no more than the price of cinema tickets.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	10
G. Landasan Teori	14
H. Metode Penelitian	17
BAB II AWAL MULA BIOSKOP DI SEMARANG	25
A. Bioskop di Indonesia	25
B. Jenis Film dan Persebarannya di Bioskop	33
C. Bioskop Keliling	37
D. Awal Mula Bioskop di Semarang	41

BAB III PERKEMBANGAN BIOSKOP DI KOTA SEMARANG

TAHUN 1980-1998.....	45
A. Festival Film Indonesia 1980 di Kota Semarang.....	45
B. Perkembangan Bioskop di Kota Semarang	49
C. Bioskop-bioskop di Kota Semarang.....	54
D. Pasang Surut Bioskop di Kota Semarang.....	63

BAB IV BIOSKOP DAN PENGARUNYA TERHADAP KEHIDUPAN

SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KOTA SEMARANG	70
A. Alasan Menonton ke Bioskop	70
B. Pengaruh Adanya Bioskop Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Semarang.....	72
C. Peran lain Bioskop	79

BAB V SIMPULAN	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	91



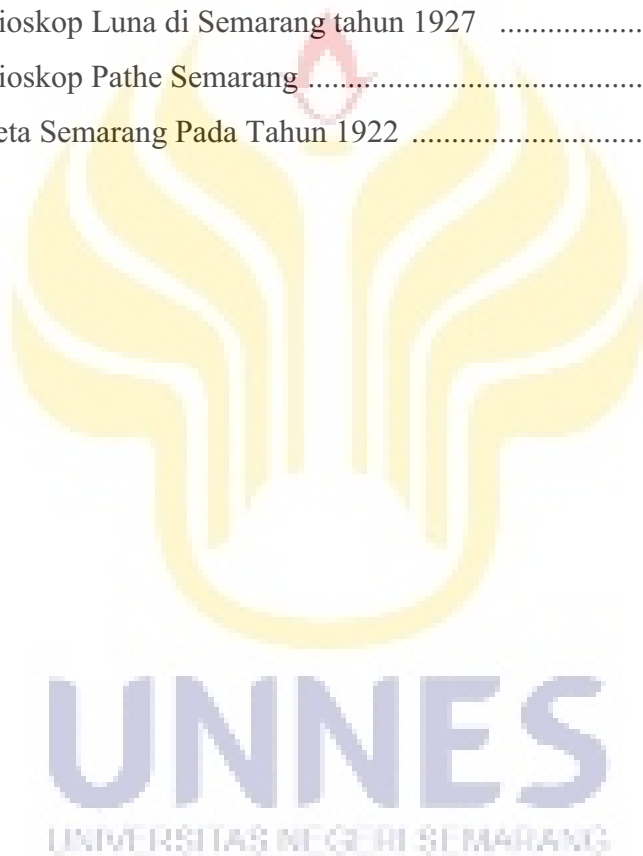
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bioskop Semarang pada tahun 1936.....	49
Tabel 2. Bioskop Semarang pada tahun 1976.....	51
Tabel 3. Bioskop Semarang tahun 1979	52
Tabel 4. Bioskop Semarang pada tahun 1980.....	53
Tabel 5. Bioskop Semarang pada tahun 1983.....	54
Tabel 6. Distributor Film di Kota Semarang.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Iklan koran Suara Merdeka tahun 1980	64
Gambar 2. Bioskop Grand Jalan Mataram	91
Gambar 3. Gedung Bioskop Orion di Semarang	92
Gambar 4. Bioskop Murni Semarang Tahun 1942-1990an	93
Gambar 5. Bioskop Luna di Semarang tahun 1927	94
Gambar 6. Bioskop Pathe Semarang	95
Gambar 7. Peta Semarang Pada Tahun 1922	108



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bioskop Grand Jalan Mataram	91
Lampiran 2. Gedung Bioskop Orion di Semarang	92
Lampiran 3. Bioskop Murni Semarang Tahun 1942-1990an	93
Lampiran 4. Bioskop Luna di Semarang tahun 1927	94
Lampiran 5. Bioskop Pathe Semarang	95
Lampiran 6. Data Bioskop di Kota Semarang tahun 1984	96
Lampiran 7. Data Bioskop di Jawa Tengah tahun 1994	100
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian	103
Lampiran 9. Data Informan	104
Lampiran 10. Peta Semarang Pada Tahun 1922	108
Lampiran 11. SK Menteri Penerangan No. 172/Kep/Menpen/1979	110
Lampiran 12. SK Menteri Penerangan No. 204/Kep/Menpen/1979	112
Lampiran 13. Keputusan Gubernur Jateng No. 484.05/5/1980	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal sejarah film di Indonesia tidak dapat lepas dari perubahan sosial di Indonesia. Sejak awal diperkenalkannya film tahun 1900 hingga perkembangannya sampai akhir tahun 1990-an, bioskop memegang peranan penting sebagai media bagi film untuk menyampaikan pesan dan informasi dalam film tersebut. Ketika bioskop pertama Indonesia didirikan di Batavia, ibukota tanah jajahan, sebuah zaman baru telah dimulai di Indonesia, yaitu zaman etis. Zaman ini merupakan zaman ekspansi, efisiensi, dan kesejahteraan. Pelayanan kredit rakyat, rumah gadai pemerintah, layanan informasi, peningkatan pertanian, peningkatan kesehatan, pengobatan untuk rakyat, pelayanan pos, telegram, telepon, kereta api negara dan sekolah-sekolah, semuanya menjadi aktivitas negara (Takashi, 1997: 10-36).

Secara populer “bioskop” dikenal sebagai gedung atau tempat pertunjukan film untuk umum dengan dipungut bayaran. Bioskop, berasal dari bahasa Yunani, gabungan sukukata *bios* yang artinya hidup dan *skopion* atau *skopein* yang artinya melihat atau mengamati. Sejak awal kehadirannya di Indonesia diterjemahkan *gambar hidoep*. Secara khusus “bioskop” dapat diartikan sebagai tempat bercengkrama (*rendevous*) bagi pembuat (*sineas*) dengan penggemar/pecinta seni film dan atau film seni (Tjasmadi, 1992: 1).

Gelombang transformasi menuju masyarakat modern mengantar Hindia Belanda memasuki abad ke-20. Penduduk yang masih dikuasai penjajah, dalam kurun waktu ini terdapat sebuah kejutan di akhir tahun 1900, melalui iklan yang tertera di surat kabar *Bintang Betawi* tanggal 4 Desember 1900. Termuat disana kabar menggemparkan *Nederlandsche Bioscope Maatschappij* (perusahaan bioskop Belanda), mulai tanggal 5 Desember 1900 menyelenggarakan pertunjukan besar pertama yang akan berlangsung tiap malam, mulai pukul 19.00, di sebuah rumah di Tanah Abang Kebondjae (Manage), disebelah pabrik kereta (bengkel mobil) *Maatschappij Fuchss* (Jauhari, 1992: 1).

Iklan surat kabar Bintang Betawi 30 Nopember 1900 berbunyi:

“*De Nederlandsch Bioscope Maatschappij* (Matschappij Gambar Idoep) memberi taoe bahoewa lagi sedikit hari ija nanti kasi lihat tontonan amat bagoes jaitue gambar-gambar idoep dari banjak hal jang belon lama telah kedjadian di Europa dan di Efrika Selatan. Tontonan bioskop pertama kali ini diadakan di Tanah Abang tepatnya disebelah rumah Fabriek Kereta dari Maattschappij Funch, diberi nama bioskop Kebondjae. Setelah pemutaran perdananya Bioskop Kebondjae segera menjadi terkenal, dengan sajian antara lain “Sri Baginda Maharatu Belanda bersama yang mulia Hertug Hendrik ketika memasuki Den Haag.” (Yusabiran, 2009: xvi).

Bioskop Kebondjae yang kemudian bernama *The Rojal Bioscope* kemudian mendapat saingan baru bernama *Biograph Compagnij* yang datang dari Bombai pada tahun 1904 yang terletak di Tanah Lapangan Mangga Besar. Setahun kemudian, *American Animatograph* hadir di Gedong Kapitein Tan Boen Koei di Kongsu Besar, dengan janji ambisius menyajikan *gambar idoep* paling bagus, paling terang, paling tetap (tidak goyang, tidak bergetar) (Jauhari, 1992: 8).

Film pertama yang diputar masih merupakan kumpulan gambar-gambar bergerak yang disatukan dan tidak bersuara yang disebut dengan *gambar idoep*. Pemutaran film tersebut mendapatkan antusias yang besar dari orang-orang karena belum pernah melihat apa yang mereka tonton itu sebelumnya, sebab hiburan yang beredar di tengah masyarakat sebelum diperkenalkan dengan film adalah panggung teater yang dikenal dengan Komedi Stambul atau ada juga yang dikenal dengan Toneel Melayu. Pemutaran film yang fenomenal tersebut kemudian mendorong munculnya banyak bioskop di beberapa tempat di Batavia seperti Bioskop Deca Park, Bioskop Rialto, Bioskop Capitol dan Bioskop Kramat Theater.

Pada tahun 1920, bioskop masih setengah bioskop, sebab struktur bangunannya masih tergolong bangunan rumah biasa. Baru antara tahun 1920-1936 gedung bioskop dibangun dengan memperhatikan struktur dan unsur-unsur lain yang membedakan bangunan ini dengan bangunan lainnya. Perbioskopian waktu itu belum menjanjikan keuntungan yang memadai, tetapi banyak dikalangan orang Tionghoa menganggap bahwa usaha ini merupakan investasi jangka panjang. Sekurang-kurangnya investasi dibidang tanah dan bangunan yang tak pernah mengalami penurunan harga.

Pada tahun 1929 Indonesia baru bisa menyaksikan keajaiban *Film Bitjara*. *Film Bitjara* pertama berjudul Fox Follies pertama kali diputar di bioskop Lurox (Surabaya) pada 26 Desember 1929. Lalu pertunjukan itu dikelilingkan ke Kota-kota Malang, Semarang, Yogyakarta, Solo

(Schouwburg Bioscoop), Bandung (Bioskop Lurox), dan di Pasar Baru (Bioskop Globe) Jakarta pada tahun 1930 (Ardan, 2004: 7).

Bioskop sudah hadir di Kota Semarang sejak tahun 1930-an. Dalam *Oranje Deli Bioscoop – Bedrijf* menyebut pada tahun 1936 di Semarang terdapat 4 bioskop yaitu City Theater (Liem Koen Hwan), Djagalan Bioscoop (A. E. Lazare), Oost Java Bioscoop (W. Appel), dan Royal Theater (Liem Khoen Goan). Lalu pada masa pendudukan Jepang yaitu awal tahun 1942 jumlah bioskop meningkat, tercatat terdapat 7 bioskop di Semarang.

Kedatangan Jepang pada tahun 1942 juga memberi perubahan dalam hal perbioskopian. Di mata penjajah Belanda, pribumi adalah warga kelas tiga, dibawah Belanda dan Cina. Dimasa awal pendudukannya Jepang membalikkan semua itu. Apalagi Jepang mewajibkan semua bioskop untuk menyediakan separuh (50%) tempat duduk untuk “kelas rakyat”. Orang Indonesia diperbolehkan menonton di bioskop yang tadinya tertutup untuk pribumi. Jepang kemudian juga menyediakan bioskop-bioskop “Istimewa oentoek bangsa Nippon” : di Ginza (Bandung), Tokyo (Jakarta), Nippon (Semarang), Toa (Yogyakarta), Nyoei (Malang) dan Nippon (Surabaya) (Ardan, 1992: 34).

Pada tahun 1970-an bioskop-bioskop mulai banyak dibangun di Kota Semarang. Pada saat itu hiburan untuk masyarakat masih terbatas, hiburan menyenangkan serupa dengan bioskop belum ada, sehingga bioskop pada kurun waktu 1970-1980 merupakan tempat hiburan favorit untuk berbagai kalangan masyarakat. Diadakannya FFI pada tahun 1980 di Semarang

menambah semangat produsen film khususnya yang ada di Semarang untuk memproduksi film yang bermutu sehingga dapat diikuti dalam festival tahunan tersebut. Selain menjadi ajang persaingan film-film terbaik, FFI juga merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap insan perfilman nasional.

Bioskop mempunyai peranan yang strategis dan merupakan ujung tombak industri perfilman Indonesia, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan produksi film Indonesia bagi masyarakat. Tak dapat dipungkiri lagi kehadiran bioskop yang paling nyata dalam perfilman nasional adalah sebagai ujung mata rantai perfilman karena bioskop merupakan tempat bertemunya konsumen atau penonton dengan komoditas jasa yang bernama film. Sebagai mata rantai terakhir dalam tata niaga film, usaha perbioskopian tentu saja tidak bisa dilepaskan dari salah satu fungsi bioskop yaitu sebagai etalase film (Irawanto, 2004: 97).

Usaha perbioskopian di Indonesia secara umum dikelola dengan bisnis murni dimana unsur dagang jauh lebih terasa dibanding unsur lainnya, seperti untuk memajukan perfilman Indonesia misalnya. Tarik menarik antara kepentingan memajukan perfilman nasional yang produksinya belum memadai dengan jumlah bioskop yang ada serta kepentingan menjaga kelangsungan usaha bioskop dengan memutar film impor menjadikan kondisi perbioskopian Indonesia bersifat fluktuatif (Irawanto, 2004: 97).

Film dari mancanegara harus tetap diimpor sebagai suplai kebutuhan bioskop yang secara berkesinambungan harus mengadakan pertunjukan *non-stop* 365 hari setahun demi mempertahankan *movie going habit* atau

kebiasaan menonton bioskop, dan kebutuhan itu sudah pasti tidak mampu diisi oleh hasil produksi dalam negeri saja, selain itu juga bermanfaat sebagai pembanding mutu (Tjasmadi, 2008: 4).

Bioskop bukan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari dapat dilihat di media masa mengenai iklan pemutaran film dan bioskop yang memutar film tersebut. Di kota-kota besar di Indonesia dewasa ini terutama untuk kalangan remaja dan dewasa, bioskop masih menjadi tempat favorit dan populer untuk menonton film. Hal ini disebabkan karena bioskop di kota-kota tersebut masih mampu eksis ditengah persaingan meningkatnya perkembangan teknologi dimana film tidak lagi serta merta hanya dapat ditonton di bioskop melainkan dapat dinikmati di rumah atau dimana saja melalui layanan internet dan melalui rubrik bioskop dalam televisi swasta. Hal ini dimungkinkan karena berikutnya yang ditawarkan oleh bioskop tidak lagi sekedar tempat untuk menonton film tetapi lebih kepada kenyamanan berupa pelayanan dan sarana prasarana yang memadai sehingga menonton film tetap lebih mengasyikkan di bioskop bersama teman-teman daripada harus menonton dirumah dengan sarana yang terbatas.

Dari berbagai wacana di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perkembangan Bioskop Di Kota Semarang Tahun 1980-1998”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana latar belakang berdirinya gedung bioskop di Kota Semarang?
- 2) Bagaimana perkembangan bioskop di Kota Semarang tahun 1980-1998?
- 3) Bagaimana pengaruh adanya bioskop terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mendeskripsikan latar belakang berdirinya gedung bioskop di Kota Semarang.
- 2) Untuk mendeskripsikan perkembangan bioskop di Kota Semarang tahun 1980-1998.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh adanya bioskop terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu alternatif yang bermanfaat bagi perorangan ataupun institusi di bawah ini:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan literatur penelitian sejarah sosial, khususnya penulisan ini jarang

dijumpai untuk para sejarawan muda di Indonesia. Adanya penulisan dari penelitian ini akan diperoleh deskripsi dari perkembangan bioskop di Kota Semarang, sehingga seluruh jajaran yang terkait baik, sejarawan, budayawan, instansi pemerintah maupun masyarakat umum lebih mengetahui secara dalam setiap peristiwa, dan dinamika kehidupan social ekonomi masyarakat Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat serta menambah pengetahuan mengenai perkembangan bioskop di Kota Semarang.

b. Bagi Pengguna

Manfaat bagi pengguna atau peneliti lain yang ingin mengkaji topik yang sama, penelitian ini dapat menjadi referensi yang baik dan membantu penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesimpangsiuran dalam melakukan interpretasi tentang masalah yang dibahas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup kajian yang meliputi lingkup wilayah (skop spasial) dan lingkup waktu (skop temporal).

a. Skop Spasial

Yaitu berkaitan dengan tempat atau daerah yang dijadikan objek penelitian adalah gedung-gedung bioskop yang ada di Kota Semarang. Sesuai dengan ruang lingkup, penelitian ini mengkaji tentang perkembangan bioskop di Kota Semarang, karena Kota Semarang menjadi salah satu kota di Indonesia yang pernah menjadi tuan rumah Festival Film Indonesia (FFI) yang ke-8 menurut SK Menteri Penerangan No.09/B/1973 yang merupakan FFI terakhir yang diselenggarakan oleh Yayasan Nasional Festival Film Indonesia, sedangkan mulai tahun 1981 diselenggarakan oleh Dewan Film Nasional.

b. Skop Temporal

Yaitu berkaitan dengan waktu yang dijadikan fokus kajian yakni tahun 1980 sampai tahun 1998. Dipilihnya tahun tersebut karena pada tahun 1980 diadakan Festival Film Indonesia yang ke-8 menurut SK Menteri Penerangan No.09/B/1973 di Kota Semarang. Selain itu, FFI di Kota Semarang merupakan FFI terakhir yang diselenggarakan oleh Yayasan Nasional Festival Film Indonesia, sedangkan mulai tahun 1981 diselenggarakan oleh Dewan Film Nasional. Sedangkan tahun 1998 adalah tahun terjadinya krisis ekonomi yang berdampak pada usaha-usaha bioskop yang ada di Kota Semarang dan juga merupakan tahun mulai tingginya pembajakan VCD/DVD yang mengakibatkan turunnya minat masyarakat untuk menonton film di bioskop (Kompas, 7 Juli 1999).

F. Kajian Pustaka

Salah satu penunjang dalam penelitian ini adalah dengan digunakannya beberapa buku sebagai acuan dasar keilmiahannya sebuah tulisan. Buku-buku tersebut di antaranya adalah buku berjudul *Layar Perak 90 Tahun Bioskop di Indonesia* oleh Haris Jauhari (ed). Buku ini menjadikan bioskop sebagai tokoh sentral yang dalam perjalanannya bersentuhan dengan berbagai macam persoalan dan peristiwa sejarah lainnya, seperti situasi per-masa perkembangan dan pertumbuhannya, kaitannya dengan berbagai situasi luar yang mempengaruhi, dan rangkaian penemuan bersejarah yang berhubungan dengan bioskop. Buku ini memetakan perkembangan bioskop menjadi enam tahap yaitu Layar Membentang (1900-1942), Berjuang Di Garis Belakang (1942-1949), Pulih Kembali (1950-1962), Hari-hari yang Paling Riu (1962-1965), Masa-masa Sulit (1965-1970), dan Dalam Gejolak Teknologi Canggih dan Persaingan (1970-1991). Buku ini bercerita mengenai perkembangan bioskop di Indonesia, yang ditulis dengan cara yang unik oleh sejumlah wartawan dan tokoh terkenal. Bioskop menjadi sebuah objek yang berinteraksi langsung dengan latar belakang situasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat.

Buku kedua yaitu karya Misbach Yusa Biran berjudul *Sejarah Film 1900-1950 Bikin Film Di Jawa*. Berisi tentang sejarah film pertama terjadi di Perancis, tepatnya pada tanggal 28 Desember 1895, ketika Lumiere telah melakukan pemutaran film pertama kali di Café de Paris. Film-film buatan Lumiere yang diputar pada pertunjukan pertama itu adalah tentang para laki-

laki dan perempuan pekerja di pabrik Lumiere, kedatangan kereta api di stasiun La Ciotat, bayi yang sedang makan siang dan kapal-kapal yang meninggalkan pelabuhan. Salah satu kejadian unik, yaitu saat dipertunjukkan lokomotif yang kelihatannya menuju ke arah penonton, banyak yang lari ke bawah bangku. Teknologi temuan Lumiere kemudian mendunia dengan cepat karena didukung oleh teknologi proyektor berfilm 2,14 inci yang lebih unggul keluaran The American Biograph, yang diciptakan Herman Casler pada 1896. Sejak pertunjukan di Café de Paris, Lumiere memiliki semboyan *I Have been to a Movie*.

Orang-orang Belanda memulai membuat film di Jawa sejak diperkenalkan *gambar idoepe* oleh Lumiere. Pada tahun 1926 sebuah film yang berjudul *Loetoeng kasaroeng* berhasil digarap dan menjadi film pertama di Indonesia. Setelah berhasil dengan film *Loetoeng Kasaroeng* ada satu film yang sangat populer dikalangan penduduk tahun 1896 dengan judul *Njai Dasima*, merupakan kisah nyata di Batavia tahun 1813.

Buku ketiga berjudul *Nonton Film Nonton Indonesia* karya JB Kristanto. Tahun 1930-an pedagang Cina merupakan pemilik bioskop, pemodal, dan penonton film. Mereka yang meletakkan dasar perfilman di Indonesia, sehingga bisa dimengerti bila pada perkembangannya saat ini film-film nasional cenderung mengejar sisi komersial dan mengabaikan segi kesenian. Sekedar meniru film yang sedang laris, tanpa perlu bersusah payah memikirkan bagaimana sisi estetikanya. Data jumlah film yang lolos sensor pada 1969-1970 terdapat hampir 800 film. Padahal jumlah gedung bioskop

saat itu 600 buah. Tidak diketahui berapa jumlah penganal saat itu, yang ditemukan dalam dokumentasi hanyalah pada 1976 penganal hampir mencapai angka 200, tepatnya 72 penganal pusat dan 114 penganal daerah. Pada tahun itu pula jumlah film yang lolos sensor 629 film. Bioskop 1025 gedung, maka dapat dibayangkan pertarungan yang terjadi. Seorang penganal rata-rata hanya dapat membeli 3 film setahun, dan untuk film itu seorang penganal harus berjuang keras agar bioskop mau memutar.

Buku keempat karya HM. Johan Tjasmadi, berjudul *Seratus Tahun Bioskop di Indonesia 1900-2000*. Membahas mengenai sulitnya mendapat data tentang jumlah film dan dari mana saja film itu didatangkan, padahal biasanya pemerintah Hindia Belanda sangat teliti dalam mencatat segala kejadian di tanah jajahannya (Nusantara), karena Pemerintah Belanda di Netherlands tidak berniat untuk memasuki industri film cerita. Satu hal yang sangat menyedihkan adalah sikap meremehkan data dan enggan menyimpan arsip oleh para pengurus organisasi perfilman di Indonesia. Antara lain organisasi perbioskopian yang sudah lahir pada zaman Hindia Belanda, tidak begitu rapi menyimpan data sehingga jumlah bioskop dan lokasi masing-masing pada tiap daerah hanya dapat diperoleh secara sporadis. Hal itu dapat dimengerti, sebab masing-masing daerah berusaha menyembunyikan data bioskop di wilayahnya agar harga sewa film atau pembelian film untuk hak edar daerah tidak terlalu tinggi. Jadi kalau ada data bioskop di suatu daerah, itupun tidak lengkap dan langka. Ada anggapan bahwa antara pengusaha bioskop dan produsen film saling membutuhkan, namun tetap saja kurang

harmonis sebab satu sama lain saling curiga mencurigai. Padahal dari data angka pengumpulan jumlah penonton, mereka sama-sama diuntungkan dari hubungan satu sama yang lainnya.

Buku ini diterbitkan untuk memperingati 100 tahun bioskop di Indonesia, berisi sejarah bioskop dari mulai masuknya ke Hindia Belanda, golongan bioskop, bioskop pada masa pendudukan Jepang, keadaan bioskop pasca kemerdekaan, kelahiran Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), pertumbuhan bioskop dan film nasional, lahirnya Sinematek Indonesia sebagai pihak yang menangani arsip film, dan dibagian terakhir disajikan 100 tahun bioskop di Indonesia dalam foto yang menampilkan 65 foto yang disusun rapi.

Buku kelima berjudul *Mengenal Bioskop Keliling Lebih Jauh*, buku yang diterbitkan oleh DPP PERFIKI (Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Pertunjukan Film Keliling Indonesia) tahun 1993 ini berisi mengenai perjalanan panjang pengusaha layar tancap atau bioskop keliling yang tidak dapat dilepaskan dari pengembangan dan pembangunan budaya sinema di Indonesia. Bioskop keliling menjadi salah satu alternatif pemerintah menjangkau masyarakat yang belum terjangkau siaran televisi untuk menyebarkan informasi pembangunan bangsa Indonesia. Seringnya pemerintah menitipkan film-film penerangan tentang Keluarga Berencana (KB), program transmigrasi dan berbagai program pembangunan nasional lainnya, film keliling berfungsi sebagai juru penerang. Pertunjukan film bioskop keliling merupakan pemutaran film yang non-komersil dengan

sasaran rakyat kecil di pedesaan. Pertunjukan semacam ini biasanya memperoleh kejayaan pada musim panen.

Buku ini menjelaskan bagaimana perjuangan pengusaha bioskop keliling, bagaimana mereka mempertahankan film nasional menjadi film yang paling diminati oleh masyarakat, dan peran PERFIKI (Persatuan Perusahaan Pertunjukan Film Keliling Indonesia) sebagai penghubung informasi dari pemerintah ke masyarakat.

Buku keenam berjudul *Sejarah Sosial Kota Semarang (1900-1950)*, buku yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional ini terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, latar belakang, sistem dan tata kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan yang terakhir mengenai kehidupan keagamaan dan pendidikan. Buku ini membantu peneliti mendapatkan gambaran kehidupan sosial masyarakat Semarang sebelum bioskop mengalami perkembangan yang pesat. Pada bagian sistem dan tata kehidupan sosial buku ini mengupas mengenai pola pelapisan sosial, pola diferensiasi kerja dan tempat tinggal, dan organisasi sosial dan sistem politik di Semarang.

G. Landasan Teori

Bioskop merupakan pertunjukkan yang diperlihatkan dengan gambar (film) yang disorot menggunakan lampu sehingga dapat bergerak (berbicara) (KBBI, 2006: 125). Sedangkan menurut Poerwadarminta (1976: 303), gedung berarti bangunan (rumah) untuk kantor, rapat/tempat mempertunjukkan hasil-

hasil kesenian, sehingga bisa disimpulkan bahwa gedung bioskop merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk menampilkan pertunjukan film.

Bioskop merupakan wadah bagi masyarakat untuk menikmati pertunjukan film, dimana penonton mencurahkan segenap perhatiannya dan perasaannya kepada gambar hidup yang disaksikan. Penonton akan menyaksikan suatu cerita yang seolah tampak nyata dihadapannya. Bioskop merupakan salah satu dari banyak alternatif seseorang untuk berekreasi.

Menurut Selo Soemarjan, masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan (Soekanto, 2009: 22). Masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi (Koentjaraningrat, 2000: 144).

Penelitian dan penulisan mengenai perkembangan bioskop dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat Semarang tahun 1980-1998 menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan sejarah sosial. Pendekatan ini digunakan dalam penggambaran peristiwa masa lalu, maka didalamnya akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji (Notosusanto, 1979: 11). Pembahasannya mencakup golongan sosial yang berperan, jenis hubungan sosial, pelapisan sosial dan status sosial.

Pernyataan Arnold Hauser membuktikan bahwa keberadaan seni dalam konteks perubahan sosial merupakan dua hal yang saling berhubungan satu sama lain. Keberadaan seni sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial, demikian pula perubahan sosial mendapat pengaruh dari keberadaan suatu

bentuk seni di lingkungan sosial masyarakat yang bersangkutan. Seni dan masyarakat sama-sama memungkinkan menjadi objek sekaligus subyek yang saling berpengaruh terhadap perubahan bagi keduanya.

Arnold Hauser dalam bukunya *The Sociology of Art* menjelaskan bahwa seni sebagai produk masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu (1) *The art of the cultural elite*, yaitu seni yang muncul di kalangan masyarakat elit; (2) *Folk art*, merupakan kesenian rakyat; (3) *Popular art*, merupakan seni yang muncul di kalangan masyarakat urban; (4) *Mass art*, yaitu seni yang dipertunjukkan lewat media dan biasanya terdapat unsur wisata (Hauser, 1982: 550). Berdasarkan hal tersebut, bioskop yang termasuk dalam seni pertunjukan dapat dikategorikan ke dalam *mass art*. Hauser menunjukkan bahwa ada hubungan sosial dan ekonomi dengan seni. Seni bukanlah merefleksikan namun justru seni berinteraksi dengan masyarakat secara luas (Hauser, 1982: 116).

Bioskop merupakan salah satu media hiburan yang murah dan populer serta memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat di Kota Semarang. Pengaruh film dapat terlihat dengan adanya perubahan pada perilaku, simbolisasi dan gaya hidup masyarakat kota Semarang. Kemampuan menerima dan menginterpretasikan pengaruh film pada masing-masing individu akan berbeda bergantung pada kondisi sosial dan budaya mereka serta pengalaman pribadi terhadap kondisi tersebut. Hal ini jelas terbukti bahwa munculnya bioskop memberi pengaruh positif dan negatif bagi masyarakat Kota Semarang.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada masa lampau. Menurut Garraghan, metode penelitian sejarah merupakan suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan cara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis dan menyajikan suatu hasil *sinthese* (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai (Wasino, 2007: 8).

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986: 32). Terdapat empat langkah dalam prosedur penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah.

1. Heuristik

Menurut terminologi heuristik (*heuristic*) dari bahasa Yunani *heuristiken* yang berarti mengumpulkan atau menemukan sumber. Yang dimaksud dengan sumber atau sumber sejarah (*historical sources*) adalah sejumlah materi sejarah yang tersebar dan teridentifikasi. Sumber sejarah adalah bahan penulisan sejarah yang mengandung *evidensi* (bukti) baik lisan maupun tertulis (Suhartono, 2010: 31).

Untuk mengefektifkan sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah, maka sumber harus diidentifikasi dan diklasifikasikan. Adapun sumber sejarah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang berasal dari saksi hidup yang mengalami atau mengambil bagian dalam suatu kejadian atau yang hidup sezaman dengan kejadian itu (Gottschalk, 1986: 35). Terdapat dua sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini.

1) Dokumen

Dokumen adalah sumber tertulis bagi informasi sejarah, yang ditulis berdasarkan jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis (Gottschalk, 1986: 38). Data dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berasal dari Sinematek Indonesia yang merupakan lembaga arsip film pertama di Asia Tenggara yang menjadi pusat studi dan pusat aktivitas pengembangan budaya sinema dan juga dari Perpustakaan Nasional. Dokumen yang didapatkan dari Sinematek Indonesia dan Perpustakaan Nasional berupa foto gedung bioskop di Kota Semarang dan arsip data jumlah bioskop di Kota Semarang yang dapat dilihat di lampiran 1-6 dan dijelaskan pula dalam bab 3.

2) Wawancara

Wawancara menurut Esterberg adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu

(Sugiyono, 2013: 231). Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data secara lisan yang berfungsi untuk mendukung data dokumen. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah budayawan Semarang yang bernama Jongkie Tio, Djawahir Muhammad, dan Tubagus P Svarajati, Ketua Komite Sinematografi Dewan Kesenian Semarang yang bernama Agus Priyo Hatmoko yang sedikit banyak mengetahui mengenai perkembangan sinema dan bioskop di Kota Semarang.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan bukan oleh saksi mata (Kuntowijoyo, 1994: 98). Tulisan dan karya-karya yang menggunakan sumber pertama (sumber primer) kemudian disebut sebagai sumber kedua (sumber sekunder), sumber sekunder biasanya berbentuk buku ataupun penelitian-penelitian sejarah. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang diperoleh dalam studi pustaka yang telah dilakukan.

Adapun pencarian sumber sekunder dalam penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Sinematek Indonesia, Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Daerah Kota Semarang, Perpustakaan Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta, dan Perpustakaan Nasional. Studi pustaka ini dilakukan

dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan perkembangan bioskop di Kota Semarang.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Adapun caranya yaitu dengan melakukan kritik. Yang dimaksud dengan kritik adalah kerja intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan objektivitas suatu kejadian (Suhartono, 2010: 35).

Dalam penelitian ini semua sumber dipilih melalui kritik ekstern dan intern, sehingga diperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yakni tentang perkembangan bioskop di Kota Semarang. Adapun kritik sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yang akan sebagai berikut.

a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal adalah usaha mendapatkan otentisitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Kritik eksternal mengarah pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber. Otentisitas mengacu pada materi sumber sezaman (Suhartono, 2010: 36). Kritik eksternal digunakan untuk menjawab tiga hal pokok, yakni keaslian sumber yang kita kehendaki, apakah sumber itu sesuai dengan aslinya atau tiruan, dan apakah sumber itu utuh atau sudah diubah-ubah. (Widja, 1988: 22)

Untuk sumber-sumber tertulis penulis melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang telah diperoleh berupa buku laporan, buku-buku literatur dan informan. Penulis menganalisis keaslian sumber melalui kertas dan tinta yang digunakan. Selain itu tahun pembuatan sumber juga diteliti. Penulis juga melakukan pengecekan seperti tanggal dan tahun yang dicantumkan, logo, stempel yang digunakan serta lembaga yang mengeluarkan arsip tersebut. Selain itu, penulis juga melakukan konfirmasi terhadap foto-foto yang didapatkan di Sinematek Indonesia untuk memastikan keasliannya.

Pada tahap pemilihan informan, penulis melakukan kritik eksternal dengan cara mendatangi calon informan kemudian menafsirkan apakah calon informan tersebut dapat memberikan keterangan tentang pertanyaan yang penulis ajukan atau tidak. Informan yang dijadikan sumber lisan adalah tokoh yang mengetahui dan ikut andil dalam menikmati bioskop dan menjadi saksi pada jamannya di Kota Semarang.

b. Kritik Internal

Kritik internal adalah kritik yang mangacu pada kredibilitas sumber, artinya apakah isi dokumen itu terpercaya, tidak dimanipulasi, mengandung bias, dikecohkan dan lain-lain. Kritik internal ditujukan untuk memahami isi teks. Pemikiran isi teks

diperlukan latar belakang pikiran dan budaya penulisnya karena apa yang tersurat sangat berbeda dengan apa yang tersirat di teks itu. Maka untuk memahami yang tersirat diperlukan pula pemahaman dari dalam (Suhartono, 2010: 37).

Pada tahap kritik internal untuk mengkritisi hasil wawancara, yaitu dengan membandingkan isi data yang penulis peroleh di lapangan berupa hasil wawancara dari informan yang satu dengan informan yang lain. Perbandingan jawaban tersebut bertujuan untuk mempermudah penulis dalam mengambil satu kesimpulan mengenai keterangan yang diberikan oleh para informan tersebut akan kebenaran jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Hal ini dilakukan karena ingin memperoleh jawaban dengan nilai pembuktian dari isi atau data sumber tersebut masih relevan atau tidak.

Isi dari buku-buku yang digunakan dapat dipercaya karena didalamnya sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Jadi informasi yang terdapat pada buku-buku tersebut masih relevan dan dapat dipercaya isinya. Hasil dari kritik internal untuk metode wawancara ini, penulis menemukan bahwa keterangan yang diberikan informan itu relevan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah menetapkan makna dan saling hubungan antara fakta-fakta yang diperoleh. Interpretasi merupakan usaha untuk

memahami dan mencari keterhubungan antara fakta-fakta sejarah sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan rasional. Satu pendapat dihubungkan dengan pendapat lainnya sehingga dapat menciptakan keselarasan penafsiran yang berhubungan dengan pembahasan yang dikaji. Interpretasi diperlukan agar data yang mati bisa bicara atau mempunyai arti. Interpretasi ada dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan. Terkadang sebuah sumber mengandung beberapa kemungkinan. Kemudian dilanjutkan dengan sintesis yang berarti menyatukan (Kuntowijoyo, 1994: 100-101).

Pada tahap ini data yang diperoleh diseleksi, dimana penulis menentukan data mana yang harus ditinggalkan dalam penulisan sejarah dan dipilih mana yang relevan. Fakta-fakta sejarah yang telah melalui tahap kritik sumber dihubungkan atau saling dikaitkan sehingga pada akhirnya akan menjadi suatu rangkaian yang bermakna.

4. Historiografi

Historiografi adalah penulisan hasil penelitian. Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses (Gottschalk, 1986: 32). Historiografi merupakan penyajian yang berupa sebuah cerita sejarah dari fakta-fakta hasil interpretasi. Tahap ini adalah tahap akhir dari kegiatan penelitian sejarah. Di sini peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk cerita sejarah dengan penggambaran yang jelas dari hasil yang diperoleh

selama melakukan penelitian. Bentuk dari cerita sejarah ini akan ditulis secara kronologis dengan topik yang jelas sehingga akan mudah untuk dimengerti dan dengan tujuan agar pembaca dapat mudah memahaminya. Hasil dari penelitian yang diteliti secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang berlaku tanpa mengurangi daya tarik untuk membaca yang kemudian dibukukan.



BAB II

AWAL MULA BIOSKOP DI SEMARANG

A. Bioskop di Indonesia

Secara populer “Bioskop” dikenal sebagai gedung atau tempat pertunjukan film untuk umum dengan dipungut biaya. Bioskop berasal dari bahasa Yunani, gabungan suku kata *bios* yang artinya hidup dan *skopion* atau *skopein* yang artinya melihat atau mengamati.

Film pertama kali dipertunjukkan pada tahun 1895 di London oleh Robert Paul yang mendemonstrasikan kepada masyarakat mengenai kebolehan proyektor film yang membuat serangkaian gambar statis (*still photos*) disorot ke layar dan serta merta menjadi gambar hidup (*moving image*); Thomas Alpha Edison di Atlanta Amerika Serikat juga memamerkan gambar hidup (*vita-scope*); dan pada tahun yang sama Aguste dan Louis Lumiere mengadakan pertunjukan gambar hidup (*cinematographe*) di sebuah *saloon* (bar) dengan pungutan 1 franc di Kota Paris, Prancis. Dengan demikian Lumiere bersaudara telah mendorong lahirnya film sebagai industri di berbagai negara (Tjasmadi, 2008:2).

Awal sejarah bioskop di Indonesia tidak dapat lepas dari perubahan sosial di Indonesia. Bioskop pertama kali didirikan pada 5 Desember 1900 di kota yang dahulunya bernama Batavia. Batavia menjadi kota yang diimpikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen (1618-1623) menjadi Amsterdam Van Java atau *Nieuwe Hollandia*, kota sejuta harapan bagi orang

Eropa yang nantinya akan menjadi pusat perkembangan gaya hidup atau lebih dikenal sebagai *Lifestyle*. Sebuah zaman baru telah dimulai di Indonesia, yaitu zaman etis. Zaman ini merupakan zaman ekspansi, efisiensi, dan kesejahteraan. Pelayanan kredit rakyat, rumah gadai pemerintah, layanan informasi, peningkatan pertanian, peningkatan kesehatan, pengobatan untuk rakyat, pelayanan pos, telegram, telepon, kereta api negara dan sekolah-sekolah, semuanya menjadi aktivitas negara (Takashi, 1997: 10-36). Munculnya iklan harian Bintang Betawi tentang pemutaran film pertama di Indonesia sangat jelas membawa warna dan semangat baru di zaman etis ini.

Iklan surat kabar Bintang Betawi 30 Nopember 1900 berbunyi:

“De Nederlandsch Bioscope Maatschappij (Matschappij Gambar Idoep) memberi taoe bahoewa lagi sedikit hari ija nanti kasi lihat tontonan amat bagoes jaitue gambar-gambar idoep dari banjak hal jang belon lama telah kedjadian di Europa dan di Efrika Selatan. Tontonan bioskop pertama kali ini diadakan di Tanah Abang tepatnya disebelah rumah Fabriek Kereta dari Maattschappij Funch, diberi nama bioskop Kebondjae. Setelah pemutaran perdananya Bioskop Kebondjae segera menjadi terkenal, dengan sajian antara lain “Sri Baginda Maharatu Belanda bersama yang mulia Hertug Hendrik ketika memasuki Den Haag.” (Yusabiran, 2009: xvi).

Bioskop Kebondjae yang kemudian bernama *The Rojal Bioscope* kemudian mendapat saingan baru bernama *Biograph Compagnij* yang datang dari Bombai pada tahun 1904 yang terletak di Tanah Lapang Mangga Besar. Setahun kemudian, *American Animatograph* hadir di Gedung Kapitein Tan Boen Koei di Kongsri Besar, dengan janji ambisius menyajikan gambar idoep paling bagus, paling terang, paling tetap (tidak goyang, tidak bergetar) (Jauhari, 1992: 8).

Politik etis, bagaimanapun, menyimpan kepentingan investasi Belanda guna lebih melancarkan perdagangan dan industrinya dengan memenuhi prasyarat birokrasi yang efisien dan tenaga kerja yang murah. Karena itu, politik etis tak membuat surut perjuangan menentang kekuasaan kolonial yang berlangsung mulai abad ke-19. Pada tahun 1908 berdirilah organisasi Budi Utomo yang mencerminkan munculnya lapisan baru berupa kaum terpelajar yang diistilahkan sebagai kultur kota besar karena identik dengan kota besar. Berkembangnya kultur baru ini, pada satu sisinya memerlukan perangkat baru pula, yaitu kebutuhan akan hiburan yang lebih canggih dan modern. Film dan bioskop di awal kehadirannya dianggap sebagai ikonografi modernitas dunia hiburan perkotaan. Pada dekade pertama abad ke 20, tidak lama dari penemuannya, hiburan baru ini merayap ke segenap penjuru dunia, mengisi waktu luang orang-orang kota.

Pada awalnya gedung bioskop khusus untuk pertunjukan film seperti yang kita kenal sekarang ini belum ada. Mula-mula film diputar di Jalan Kebonjae (*Manege*) Tanah Abang di sebelah dealer mobil *Maatschapij Fuch* dengan sajian antara lain “Sri Baginda Maharatu Belanda bersama Yang Mulia Hertog Hendrik ketika memasuki Den Haag”, kemudian film dokumenter dari kejadian-kejadian di Eropa dan Afrika Selatan. Harga karcis f.2 untuk kelas satu; f.1 untuk kelas dua; f.0,50 untuk kelas tiga. Tentu saja bioskop bukan hiburan murah, mengingat waktu itu masyarakat pribumi di pedesaan masih hidup dengan f.0,025 atau *sebondong ekuivalen 2,5 sen/hari*.

Beberapa bioskop baru didirikan di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Bioskop tetap berdiri sebagai barang tontonan yang mewah dan bergengsi. Penontonnya memang terbatas, terutama orang-orang Eropa, Cina, dan kalangan pribumi yang beruang, yaitu golongan priyayi dan ningrat. Pada masa kolonial kelas-kelas bioskop tercipta akibat pengaruh ras. Namun, lapisan ini makin lama makin meluas juga, hingga menjelang tahun 1916, pemerintah Hindia Belanda mulai melihat adanya gejala pengaruh bioskop terhadap masyarakat penontonnya.

Selain perubahan perilaku, pemerintah Hindia Belanda tampaknya mengkhawatirkan pula pandangan masyarakat jajahan terhadap diri mereka. Bioskop dan film secara tidak langsung telah membuka mata penonton pribumi tentang sifat-sifat asli bangsa kulit putih. Film yang didatangkan dari Eropa dan Amerika dianggap mempertontonkan hal-hal yang berpengaruh buruk bagi kaum pribumi, dan dapat mengubah pandangan mereka terhadap bangsa kulit putih. Sebuah artikel di *Filmland* bulan April 1923 menjelaskan hal ini :

“...film telah memberikan pandangan hidup yang lain bagi bangsa Melayu. Bukan mengenai hal utama yang disampaikan film Eropa dan Amerika, melainkan lebih merasuk pada masalah perceraian, semangat para bajingan, pesta-pesta cocktail, dan upaya mencari kesenangan yang berlebihan dari bangsa kulit putih...” (Jauhari, 1992 : 15).

Guna mengantisipasi hal ini, pemerintah untuk pertama kalinya mengeluarkan undang-undang mengatur film dan bioskop melalui *Film Ordonnantie* (Ordonansi Film) nomor 276 di tahun 1916 yang mengatur tentang Pembentukan Komisi Penilaian Film (*Commissie voor de keuring van*

Films). Dan *Film Ordonnantie* nomor 277 tentang Pengawasan Pertunjukan Film di Batavia, Semarang, Surabaya dan Medan (Tjasmadi, 2008: 198).

Pada tahun 1920, bangunan bioskop masih berbentuk rumah biasa, baru antara tahun 1920-1936 gedung bioskop dibangun dengan memperhatikan struktur dan unsur-unsur lain yang membedakan bangunan ini dengan bangunan lainnya. Usaha bioskop pada waktu itu belum menjanjikan keuntungan yang memadai, tetapi banyak di kalangan orang Tionghoa menganggap bahwa usaha ini merupakan investasi jangka panjang. Sekurangnya investasi di bidang tanah dan bangunan yang tidak pernah mengalami penurunan harga. Koran terbitan Bandung, *Panorama*, edisi 27 Agustus 1927 mencatat, hingga tahun itu, 85 persen bioskop di Hindia Belanda dimiliki pengusaha keturunan Tionghoa (Jauhari, 1992: 18).

Pada saat itu bioskop tidak terlalu menarik perhatian masyarakat karena keadaan negara yang sedang gencar-gencarnya menghadapi penjajah Belanda. Prioritas masyarakat lebih kepada memperjuangkan kemerdekaan dan film-film yang diputar di bioskop kebanyakan merupakan film dari negara luar.

Di Amerika, sejak 1927 diputar *Film Bitjara (talkie)* pertama berjudul *The Jazz Singer*. Pada seluloid rekaman gambar film sudah bisa diiringi jalur (*track*) rekaman suara musik di sisinya. Jadi, begitu gambar diproyeksikan ke layar akan muncul pula suara musik. Maka pengiring musik hidup tidak lagi diperlukan, sebagaimana yang biasa bermain di pinggir layar. Dua tahun kemudian, penonton Indonesia baru bisa menyaksikan keajaiban *Film Bitjara*.

Film Bitjara pertama berjudul *Fox Follies* pertama kali diputar di bioskop Lurox (Surabaya) pada 26 Desember 1929. Lalu pertunjukan itu dikelilingkan ke kota-kota Malang, Semarang, Yogyakarta, Solo (Schouwburg Bioscoop), Bandung (Bioskop Lurox), dan di Pasar Baru (Bioskop Globe) Jakarta pada tahun 1930 (Ardan, 2004: 7).

Film bicara ini rupanya dihasilkan dengan teknik mengisi suara langsung oleh orang ketika film diputar. Hasilnya masih sangat sederhana, namun pemilik bioskop berani menyatakan bahwa ia telah menyajikan gambar yang tidak *berkeledepan* atau gemetar karena semuanya dikerjakan secara elektronik. Di antara *gambar idoeep* bicara yang diputar mulai 6 November 1905 yang mendapat pujian di Surabaya dan Semarang itu adalah *Biograph Anak Gadis dari Orleans* dan *Chronophone Dokter Gigi* (Susanto, 2005: 135).

Kedatangan Jepang di tahun 1942 juga memberi perubahan dalam hal perbioskopian. Di mata penjajah Belanda, pribumi adalah warga kelas tiga, dibawah Belanda dan Cina. Sedangkan pada masa awal pendudukannya, Jepang membalikkan semua itu. Apalagi Jepang mewajibkan semua bioskop untuk menyediakan separuh (50%) tempat duduk untuk “kelas rakyat”. Orang Indonesia dibolehkan menonton di bioskop yang tadinya tertutup untuk pribumi. Jepang kemudian juga menyediakan bioskop-bioskop “Istimewa oentoek bangsa Nippon” : di bioskop Ginza (Bandung), Tokyo (Jakarta), Nippon (Semarang), Toa (Yogyakarta), Nyoei (Malang) dan Nippon (Surabaya) (Ardan, 1992:34).

Organisasi perbioskopian di zaman Hindia Belanda Batavia Bioscoopen Bond (BBB) berganti menjadi Jakarta Bioscoopen Bond (JBB). Lahir Persatuan Pengusaha Bioskop Palembang (PPBP) yang diketuai oleh seorang WNI keturunan Tionghoa yang bernama Islam, H. Roeslan Abdoelmanan. Di Solo lahir Persatuan Perusahaan Exploitasi Bioskop Indonesia. Para pengusaha bioskop berusaha mengadakan pertemuan untuk menyatukan persepsi, dan lahirlah GAPEBI (Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia) sebagai induk organisasi tetapi masing-masing daerah tetap berpegang pada organisasi yang sudah ada (Tjasmadi, 2008: 35).

Dua organisasi perbioskopian yang merajai di Indonesia yaitu Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia (GAPEBI) yang lahir pada 5 Januari 1950, serta Persatuan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (PPBSI) lahir pada tanggal 10 April 1955. Kaharoedin sebagai ketua GAPEBI dan Roeslan Abdulmanan sebagai ketua PPBSI berinisiatif untuk menadakan pertemuan di Kaliurang, Yogyakarta pada tanggal 14-15 Mei 1960. Kedua organisasi tersebut bersedia bersatu dan lahirlah Gabungan Bioskop Seluruh Indonesia (GABSI). Hasil persatuan ini tidak berlangsung lama karena berganti nama lagi menjadi Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS) Bioskop Swasta pada tahun 1961. Dewan pengurus Bioskop OPS Bioskop Pusat diketuai oleh Roeslan Abdulmanan dan Kaharoedin sebagai penulis.

OPS berlangsung cukup lama, bertahan dengan tiga kali konferensi. Pertama di Selecta (Malang) tanggal 23-25 Mei 1962, kedua di Lembang (Bandung) tanggal 7-9 Januari 1964, ketiga di Cipayung (Bogor) tanggal

29 November- 1 Desember 1966. Setelah konferensi kerja di Tawangmangu (Karanganyar) tanggal 17-18 April 1968 menyusul konferensi keempat di Jakarta tanggal 19-23 Desember 1970, mengeluarkan nama baru yaitu Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). GPBSI dipimpin oleh H.M. Ahadin dan M. Johan Tjasmadi bersama PPFI, PARFI, KFT, dan GASFI yang dikukuhkan lewat Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 114-B tanggal 24 Agustus 1976. Sebagai ketua badan pengawasnya yaitu Kartono Hadidjojo, SH (Mr. Liem Tjoen Hoo) yang berasal dari Semarang (Tjasmadi, 2008 : 99).

Pada tanggal 30 April 1964 terjadi Aksi Pemboikotan Film-film Imperialis Amerika Serikat (PARFIAS) yang mengguncangkan perfilman. Dalam aksi tersebut antara lain juga adanya pembakaran beberapa gedung bioskop dan penutupan 353 gedung bioskop dari total 753 gedung yang terdaftar waktu itu (Suryapati, 2010: 16). Film dari Rusia, India, Melayu, Filipina mulai banyak beredar. Sedangkan film Amerika mulai kembali bisa ditonton masyarakat pada tahun 1966.

Perkembangan bioskop secara keseluruhan memperlihatkan bahwa selama 10 tahun terakhir (dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1986) menunjukkan adanya kenaikan jumlah bioskop, tahun 1986 bertambah 59 persen bila dibandingkan dengan jumlah bioskop tahun 1977. Di beberapa provinsi pertambahan ini ada yang mencapai 100-300 persen seperti di Irian Jaya, Bengkulu, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku. Di provinsi lainnya pertambahan bioskop

berkisar antara 20-100 persen kecuali di provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara banyaknya bioskop malahan berkurang yaitu sebesar 8 persen dan 33 persen.

Perkembangan rata-rata tempat duduk per bioskop selama tahun 1983 sampai dengan 1986, baik menurut provinsi maupun secara nasional tidak menunjukkan kenaikan. Data tahun 1984 menunjukkan ada kenaikan jumlah tempat duduk dibandingkan tahun 1983, tetapi pada tahun 1985 dan 1986 jumlah tempat duduk per bioskop cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 1984. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa walaupun jumlah bioskop bertambah tetapi rata-rata jumlah tempat duduk tiap bioskop makin berkurang.

Perkembangan jumlah penonton bioskop di Indonesia dari tahun 1977 sampai dengan 1980 mengalami kenaikan jumlah penonton, kemudian setelah tahun 1980 terjadi penurunan. Penurunan jumlah penonton ini mungkin disebabkan antara lain oleh semakin banyaknya film VCD yang dapat ditonton penduduk didalam rumah.

B. Jenis Film dan Persebarannya di Bioskop

Pada awal perkembangan film di Indonesia yakni pada 5 Desember 1900, film pertama yang ditampilkan adalah film dokumenter yang menceritakan perjalanan Ratu Belanda dan Raja Hertog Hendrik di Kota Den Haag. Film cerita pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1905 yang diimport dari Amerika. Film-film import ini berubah judul kedalam bahasa

Melayu. Sementara film-film produksi pemerintah kolonial saat itu masih berupa film dokumenter.

Di negara-negara lain (barat) film cerita sendiri sudah mulai diproduksi antara tahun 1902-1903. *The Life an American Fireman* (1903) adalah film cerita Amerika pertama yang dibuat oleh Edwin S. Porter (1869-1941). *La Presa* di Roma dibuat di Italia oleh Filateo Alberini tahun 1905. Kemudian India juga membuat film cerita pertama mereka yakni *Rajah Harisandra* tahun 1913. Film cerita import ini cukup laku di Indonesia. Jumlah bioskop meningkat. Daya tarik tontonan baru ini ternyata mengagumkan.

Pada tahun 1923 mulai masuk film-film dari Cina melalui China Moving Picture. Dua film Tiongkok pertama adalah *Li Ting Lang* yang bercerita tentang revolusi di Cina dan *Satoe Perempoean Yang Berboedi*. Film-film dari Cina ini mulai dibanding-bandingkan dengan film produksi Amerika (Hollywood). Satu hal yang agak unik adalah usaha promosi film yang dilakukan oleh pemilik bioskop melalui surat kabar seringkali lebih menonjolkan kemajuan-kemajuan fasilitas bioskop tempat film itu diputar. Seluruh film yang diputar hingga tahun tersebut masih berupa film bisu.

Film lokal (Indonesia) pertama kali diproduksi pada tahun 1926. Sebuah film cerita yang masih bisu, dibandingkan dengan negara lain yang sudah mulai memproduksi film bersuara Indonesia memang agak terlambat. Film cerita lokal pertama yang berjudul *Loetoeng Kasaroeng* ini diproduksi oleh *NV Java Film Company*, film ini diputar di Elita dan Oriental Bioskop (Majestic) Bandung dari tanggal 31 Desember 1926- 6 Januari 1927. Film

lokal berikutnya adalah Eulis Atjih yang diproduksi oleh perusahaan yang sama. Setelah film kedua ini diproduksi, kemudian muncul perusahaan-perusahaan film lainnya seperti Halimun Film Bandung yang membuat Lily van Java dan Central Java Film Coy (Semarang) yang memproduksi *Setangan Berlumur Darah*.

Pada tahun 1927 film-film bersuara mulai beredar di Indonesia. Bahkan film dari Hollywood sudah menggunakan teks melayu. Industri film lokal sendiri baru bisa membuat film bersuara pada tahun 1931. Film ini diproduksi oleh Tans Film Company bekerjasama dengan Kruegers Film Bedrif di Bandung dengan judul *Atma de Vischer*. Selama kurun waktu itu (1926-1931) sebanyak 21 judul film (bisu dan bersuara) diproduksi. Jumlah bioskop pun meningkat dengan pesat. *Filmrueve* (majalah film pada saat itu) pada tahun 1936 mencatat adanya 277 bioskop di Indonesia. Dalam daftar itu ternyata menunjukkan bahwa bioskop bukan hanya berada di kota-kota besar tapi juga dikota-kota kecil seperti Ambarawa, Subang, dan Tegal.

Pada tahun 1941 produksi film Indonesia mengalami masa panen, tercatat 41 judul film yang diproduksi, terdiri dari 30 film cerita dan 11 film yang bersifat dokumenter. Produksi film menurun drastis pada tahun 1942 yakni hanya 3 film saja yang diproduksi. Hal ini tentunya berkaitan dengan masuknya pendudukan Jepang di Indonesia yang melarang aktivitas pembuatan film. Jepang mendirikan Pusat Kebudayaan (Keimin Bunka Sidhoso) yang didalamnya ada Nippon Eiga Sha yang mengurus bagian film. Pada saat pendudukan Jepang film mulai digunakan sebagai alat propaganda

politik secara terang-terangan. Film yang diputar di bioskop-bioskop adalah film dokumenter Jepang yang menonjolkan “kegagahan” Jepang dan film-film Jerman yang merupakan sekutu Jepang, sedangkan film Amerika dilarang beredar.

Pada tahun 1950, menjadi tonggak kehadiran film nasional Indonesia karena produksi film telah ditangani secara langsung oleh tenaga-tenaga Indonesia, Usmar Ismail mendirikan PERFINI (Perusahaan Film Nasional Indonesia) dengan *Darah dan Doa* sebagai film pertama. Film ini memiliki arti penting bagi sejarah perfilman Indonesia, sehingga Dewan Film Nasional dalam konferensinya (11 Oktober 1962) menetapkan hari pengambilan gambar pertama film ini (30 Maret) sebagai hari film nasional.

Ada dua perusahaan film yang sejak awal dari tahun 1955 memperlihatkan kesungguhan untuk membuat film-film baik. Setidaknya nampak dari tema dan isi ceritanya. Sebagai perusahaan yang bernaung dibawah Kementrian Penerangan dan mempunyai misi untuk memberi penerangan dan pendidikan rakyat, yaitu Perusahaan Film Negara (PFN) dan Perusahaan Film Nasional Indonesia (PERFINI) yang berdiri secara swasta.

PFN berusaha membuat film-film yang mengandung unsur-unsur penerangan dan pendidikan berusaha menampilkan film-film itu sebagai karya seni. Maksud dan tujuan jelas tercermin dari judul-judulnya.

C. Bioskop Keliling

Bioskop sebagai ujung mata rantai perfilman merupakan tempat bertemunya konsumen (penonton) dengan komoditas jasa yang bernama film. Pada titik inilah terjadi tarik-menarik antara kepentingan mengungkap perfilman nasional yang produksinya tidak memadai dengan jumlah bioskop yang ada serta kepentingan menjaga kelangsungan bisnis bioskop dengan menjual film impor. Hal itu menjadikan kondisi perbioskopian bersifat fluktuatif (Irawanto, 2004: 97). Padahal perfilman di Indonesia tidak hanya menggunakan bioskop dalam peredaran film, tetapi juga menggunakan apa yang disebut dengan bioskop keliling atau yang sering juga disebut dengan layar tancap. Bila bioskop saja mengalami fluktuatif, apalagi dengan layar tancap.

Pada dasarnya yang dinamakan bioskop keliling adalah peredaran film secara sederhana melalui cara yang lebih praktis dan bersifat tidak tetap karena dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karenanya, bioskop keliling mempunyai keunggulan, yaitu kemampuan menjangkau desa-desa yang tidak memiliki gedung bioskop. Kegiatan pemutaran film di luar gedung bioskop tentu saja bukan kegiatan yang baru pertama kali dilakukan sebab pada masa Hindia Belanda, Tuan Talbot dan rekan-rekannya selalu mempertunjukkan film di dalam bangunan berdinding bambu (*bilik*) beratap seng, yang didirikan di lapangan terbuka dan selalu berpindah-pindah (Jauhari, 1992: 5).

Awalnya bioskop keliling diperuntukkan sebagai sarana penerangan dari berbagai kepentingan, baik perusahaan, pengetahuan, dokumentasi atau penerangan umum. Bioskop keliling merupakan hiburan yang sangat digemari dan termasuk murah. Bioskop keliling yang datang kepada masyarakat bukan masyarakat yang datang ke bioskop, bioskop keliling juga tidak terikat dengan tatanan yang tidak biasa bagi masyarakat pedesaan atau masyarakat pinggiran kota yang biasa santai dan tidak banyak aturan.

Biasanya berlokasi di lapangan terbuka, maka tidak jarang pedagang lesehan juga banyak yang berjualan disekitar bioskop keliling. Masyarakat sering datang beramai-ramai bahkan tidak jarang patungan untuk membeli karcisnya. Dikarenakan masih berpindah-pindah dari desa satu ke desa yang lain, pertunjukan layar tancap masih dianggap modern dan langka. Jadi, pengaruh film kepada masyarakat betul-betul mengena, sebagian besar masyarakat akan berdiskusi mengenai film yang baru saja dilihat sewaktu perjalanan pulang menuju ke rumah masing-masing (Perfiki, 1993: 18).

Secara teknis bioskop keliling hanya berupa perangkat keras yang terdiri dari sebuah proyektor, layar berukuran (3x7 meter – 4x8 meter), konstruksi untuk mendirikan layar (tiang bambu, besi *knockdown*), *sound system* (*amply*, *speaker*, *tapedeck*), *player*, *copy film*, tenda yang dikemas dalam alat transportasi yang dioperasikan oleh satu orang sopir dengan dua orang kru operator diesel (Erwantoro, 2014: 286).

Bioskop keliling sudah mulai dikenal sejak zaman Hindia Belanda. Namun pada awal kemerdekaan bioskop keliling kurang mendapat perhatian

dari kalangan perfilman nasional karena dianggap sebagai pengamen belaka. Dalam perkembangannya, para pengusaha bioskop keliling membentuk organisasi dengan membentuk Yayasan Persatuan Bioskop Keliling Indonesia (PERBIKI) pada bulan Februari 1978. Organisasi ini kemudian berubah menjadi Persatuan Perusahaan Film Keliling Indonesia (PERFIKI) pada bulan Desember 1991.

Budaya menonton film dari layar tancap atau bioskop keliling ini sangat diminati oleh masyarakat pertanian dan berkembang. Tak heran kalau perangkat desa memanfaatkan keberadaan bioskop keliling menjadi suatu pertunjukan permanen untuk mengumpulkan dana desa. Pertunjukan ini biasanya memperoleh kejayaan pada musim panen, bahkan tidak jarang masyarakat membayar dengan hasil panen, lalu pihak desa yang menguangkannya.

Pada musim ini pengusaha bioskop keliling mulai kewalahan untuk mencari film yang akan disuguhkan. Satu film kadang bertahan untuk lima hari, untuk ukuran desa ini tentu termasuk rangking pemutarannya. Lain halnya ketika musim hujan. Disamping enggan, karena tempat pertunjukannya becek, penonton juga tidak mau kehujanan dikarenakan tempatnya tidak beratap. Pada musim hujan seperti itu, penontonnya kadang hanya beberapa orang saja, mereka menggunakan payung daun pisang atau topi.

Tidak jarang, penonton berhamburan keluar bila gerimis mulai turun, lalu akan kembali lagi setelah gerimis reda. Karena setiap gerimis bubar,

maka bioskop yang masih sangat sederhana itu disebut bioskop misbar (Perfiki, 1993: 19).

Tidak lama kemudian muncullah bioskop tenda keliling. Tenda bioskop dihias sedemikian rupa dengan dekorasi bendera dan umbul-umbul. Salah satu sisi bagian dalam tenda terpampang sebuah layar besar dimana gambar hidup diproyeksikan. Sisi-sisi lainnya ditemeli poster-poster film unggulan yang hendak diputar. Lantai tenda dilapisi *vloer* dan alas semacam tikar.

Dari data dan pengalaman Djathi Kusumo, seorang penggemar film nasional, ternyata penonton dari golongan masyarakat menengah kebawah yang secara kasar berjumlah 80% adalah penggemar film nasional, hal ini dikarenakan keterbatasan dan kesederhanaan pola pikir yang hanya ingin terhibur ketika melihat gambar hidup. Jangankan menganalisa cerita yang harus disimpulkan sendiri, sedangkan melihat sambil membaca teks subtitle saja pusing. Maka wajar bila film-film Warkop menguasai pasar bahkan mampu bersaing dengan film-film impor yang diputar di bioskop sinepleks. Jelas bahwa budaya layar tancap dan perkembangannya ikut andil dalam perkembangan perfilman nasional. Penonton yang sebagian besar menggemari film nasional tidak butuh disuguhi film yang dibuat dengan ongkos mahal dan rumit, tapi mereka hanya butuh hiburan yang sederhana dan mudah dicerna (Perfiki, 1993: 19).

D. Awal Mula Bioskop Di Semarang

Bioskop sudah hadir di Kota Semarang sejak tahun 1930-an. Dalam *Oranje Deli Bioscoop – Bedrijf* menyebut pada tahun 1936 di Semarang terdapat 4 bioskop yaitu City Theater (Liem Koen Hwan), Djagalan Bioscoop (A. E. Lazare), Oost Java Bioscoop (W. Appel), dan Royal Theater (Liem Khoen Goan). Disebutkan juga bahwa di Jawa Tengah pada tahun 1936 terdapat 21 bioskop yang tersebar di beberapa daerah, yaitu Ambarawa, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Purwokerto, Purworejo, Salatiga, Semarang, Solo, dan Tegal. Dari 13 wilayah di Jawa Tengah yang memiliki gedung bioskop, Semarang merupakan wilayah yang memiliki gedung bioskop terbanyak di Jawa tengah.

Bioskop pada awalnya tidak hanya digunakan sebagai tempat pemutaran film. Bioskop juga digunakan sebagai tempat pertemuan suatu komunitas, dan sebagai tempat pertunjukan lainnya, seperti pertunjukan ular berbisa sebelum pemutaran film, pertunjukan orkes, tonil, komedi stambul dan sandiwara. Film diputar menggunakan pijar yang ditembak ke layar. Pemutaran dilakukan secara manual menggunakan tangan. Film yang muncul pun masih hitam putih dan tanpa suara. Hampir separuh (100 dari 225) bioskop di Indonesia pada tahun 1936 dimiliki Cina (Tjasmadi, 1992: 15).

Pada saat itu bioskop tidak terlalu menarik perhatian masyarakat karena keadaan negara yang sedang gencar-gencarnya menghadapi penjajah Belanda. Prioritas masyarakat lebih kepada memperjuangkan kemerdekaan dan film-film yang diputar di bioskop kebanyakan merupakan film import.

Pada masa pendudukan Jepang, Belanda telah pergi dari Indonesia. Bioskop digunakan sebagai tempat penyebaran propaganda Jepang. Jepang menggunakan film sebagai media penyebaran visi dan misinya untuk mempengaruhi masyarakat bahwa Jepang adalah penyelamat Indonesia. Pada masa Jepang ini, klarifikasi bioskop tidak seketat ketika penjajahan Belanda dimana kesenjangan sosial begitu mencolok. Pada masa Jepang, masyarakat kelas bawah diberi kursi 50 persen untuk tetap bisa menonton di bioskop-bioskop mana saja. Hal ini karena tujuan utama Jepang menjadikan film sebagai alat propaganda kepada seluruh lapisan masyarakat.

Melihat pentingnya arti film sebagai media propaganda, sejak awal pendudukannya pemerintah militer Jepang telah melakukan kontrol sepenuhnya atas dunia perfilman. Staf propaganda yang menyertai operasi militer, menyita seluruh perusahaan perfilman. Untuk melaksanakan kebijakan di bidang perfilman, *Sendenbu* pada bulan Oktober 1942 membentuk *Jawa Eiga Kosha* (Perusahaan Film Jawa) yang dikepalai oleh Oya Soichi (Kurasawa, 1993: 238).

Dengan tujuan propaganda, pemutaran film diusahakan untuk menggapai sebanyak mungkin penonton, namun sayangnya jumlah bioskop yang tersedia hanya sedikit dan tingkat penyebarannya juga tidak merata. Mengenai rasio antara jumlah penduduk Jawa dengan bioskop pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Kurasawa (1993: 242-243) menulis:

“Dalam hal ini perbandingan antara jumlah gedung bioskop dengan penduduk, jumlah gedung bioskop di Jawa sangat sedikit, yaitu jika diperkirakan jumlah penduduk Jawa sekitar 50 Juta, maka hanya tersedia sebuah gedung bioskop untuk 400.000 orang. Namun, jumlah

gedung bioskop per satu juta orang sangat tidak seimbang, tergantung pada karesidenannya, dan beragam dari 0,5 di Bojonegoro sampai 8,2 di Surabaya. Secara relatif, banyak gedung bioskop di karesidenan seperti Surabaya, Besuki, Malang, dan Jakarta, sementara hanya ada sedikit di Bojonegoro, Cirebon, Madiun, dan Pekalongan. Dikabarkan bahwa seluruh 129 gedung bioskop berlokasi di daerah perkotaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Nichi'ei* pada awal tahun 1942, 52 gedung bioskop terpusat di 7 kota besar sebagai berikut: Jakarta 13; Surabaya 12; Semarang 7; Bandung 7; Malang 6; Surakarta 4; Yogyakarta 3.”

Memasuki tahun 1950 usaha perbioskopian di Kota Semarang mulai pulih kembali. Soekarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia pertama mulai memperbaiki berbagai sektor industri di Indonesia, termasuk industri perfilman dan bisnis perbioskopian. Bioskop yang telah ada sejak masa Kolonial dan Jepang mulai diperbaiki fasilitasnya dan mulai memutar film-film yang lebih baik. Penonton mulai berdatangan dan menjadikan bioskop sebagai tempat alternatif melepas penat untuk mencari hiburan. Di Kota Semarang bioskop-bioskop mulai dibangun dan mulai menjadi usaha yang menjanjikan dengan memberikan banyak keuntungan bagi yang mengelolanya.

Pada akhir pemerintahan Soekarno terjadi kericuhan yang dilakukan oleh PAPFIAS (Panitia Aksi Pengganyangan Film-film Imperialis Amerika Serikat). Tahun-tahun ini ditandai dengan aksi pengganyangan film-film imperialisme Amerika Serikat dengan melakukan pemboikotan, pencopotan reklame film di depan gedung bioskop hingga pembakaran gedung bioskop, akan tetapi aksi pembakaran itu beruntung tidak terjadi di Kota Semarang. Aksi yang dilakukan karena ekspresi ketidakpuasan terhadap masuknya pengaruh budaya Barat, khususnya budaya Amerika yang masuk ke Indonesia

mempengaruhi budaya asli Indonesia. Jumlah bioskop yang sebelumnya berjumlah 700 buah pada tahun 1964, pada tahun 1965 menurun menjadi 350 bioskop (Kurnia, 2004: 102). Bisnis bioskop mengalami penurunan yang sangat drastis akibat gejolak politik yang besar ini.



BAB V

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Perkembangan Bioskop dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Semarang Tahun 1980-1998 dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, bioskop sudah hadir di kota Semarang sejak tahun 1930-an. Dalam *Oranje Deli Bioscoop – Bedrijf* menyebut pada tahun 1936 di Semarang terdapat 4 bioskop yaitu City Theater (Liem Koen Hwan), Djagalan Bioscoop (A. E. Lazare), Oost Java Bioscoop (W. Appel), dan Royal Theater (Liem Khoen Goan). Pada tahun 1936 di Jawa Tengah terdapat 21 bioskop yang tersebar di 13 wilayah dan Semarang merupakan wilayah yang memiliki gedung bioskop terbanyak di Jawa tengah. Bahkan, dalam *Volkshuisvestingcongres Semarang 15-17 April 1922* disebutkan terdapat 2 bioskop di jalan Bodjong (sekarang jalan Pemuda) yaitu Oost Java Bioscoop dan Pathe Theatre. Pathe Theatre inilah yang kemudian menjadi Royal Theatre dan kemudian berubah nama lagi menjadi Semarang Theatre.

Kedua, bioskop di Kota Semarang baru mulai menunjukkan perkembangan pada tahun 1950-an, hal ini dipicu oleh semakin kondusifnya situasi dalam negeri pasca terjadinya revolusi kemerdekaan di Indonesia pada tahun 1945-1949. Tahun 1950-an ini juga ditandai dengan pergantian nama-nama bioskop di Kota Semarang yang tadinya “berbau” kolonial ke nama yang diIndonesiakan. Adapun nama-nama bioskop di Kota Semarang yang mengalami nasionalisasi antara lain Royal Theatre menjadi Semarang Theatre, Oost Java

Bioscoop menjadi Bioskop GRIS dan Djagalan Theatre menjadi Bioskop Jagalan. Tahun 1970-an merupakan tahun emas bioskop di kota Semarang, terdapat 8 bioskop yang berdiri pada periode 1970-an tersebut diantaranya GRIS, Gajahmada Theater, Peterongan, Kanjengan, Siliwangi, Kencana, Rajawali, dan palapa. Hal ini didukung dengan adanya enam distributor film yang ada di Kota Semarang.

Ketiga, pada tahun 1950 hingga 1970 film sangat berperan dalam transformasi mode pakaian yang muncul dan tren di Kota Semarang, selain itu film juga berpengaruh terhadap tren musik. Keberadaan bioskop di Kota Semarang juga mempengaruhi dalam bidang perekonomian Kota Semarang yaitu adanya pajak gedung bangunan dan pajak tontonan yang harus ditanggung bioskop. Sekitar tahun 1980-an film juga membawa perubahan terhadap gaya rambut bagi pecinta film mandarin, mereka cenderung meniru gaya rambut Bruce Lee. Tidak hanya gaya rambut namun juga gestur tubuh, mode sepatu, pemakaian celana *komprang* dan juga penggemar film mandarin berbondong-bondong membeli *double stick* seperti yang digunakan dalam film-film Hongkong yang menampilkan adegan silat dan kungfu. Pada tahun 1990-an bioskop diwarnai dengan film-film bergenre komedi, khususnya film nasional. Diantaranya adalah film-film Warkop dan Doyok yang menjadi favorit masyarakat Indonesia tidak terkecuali di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Biro Pusat Statistik. 1976. *Daftar Nama dan Alamat Bioskop Indonesia 1976*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Biro Pusat Statistik. 1979. *Daftar Nama dan Alamat Bioskop Indonesia 1979*. Jakarta: Sinematek Indonesia.
- Biro Pusat Statistik. 1983. *Daftar Nama dan Alamat Bioskop Indonesia 1983*. Jakarta: Sinematek Indonesia.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1984. *Data Perbioskopian Di Indonesia 1984*. Jakarta: Sinematek Indonesia.

Buku

- Ardan, SM. 1992. *Dari Gambar Ideop ke Sinepleks*. Jakarta: Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia.
- , 2004. *Setengah Abad Festival Film Indonesia*. Jakarta : Gedung Film.
- Charles, Dulles. 1985. *Dasar-Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Intergrita Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendy, Heru. 2008. *Industri Perfilman Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Hauser, Arnold. 1982. *The Sociology of Art*. Terjemahan Kenneth J Northcott. London: The University Press.
- Irawanto, Budi. 2004. *Menguak Peta Perfilman Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Jauhari, Haris. 1992. *Layar Perak: 90 Tahun Bioskop Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kanumoyoso, Bondan. 2001. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Koenjtaraningrat. 1991. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- , 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kotler, Philip. 2002. *Majemen Pemasaran*. Jakarta: Prebalindo.
- Kristanto, JB. 2004. *Nonton Film Nonton Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- , 2007. *Katalog Film Indonesia 1926-2007*. Jakarta: Nalar.
- Kurnia, Novi, dkk. 2004. *Menguk Peta Perfilman Indonesia*. Yogyakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI.
- Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol*. Alih bahasa oleh Hermawan Sulisty. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Muhammad, Djawahir. 1995. *Semarang Sepanjang Jalan Kenangan*. Semarang : Pemdadata II Semarang.
- Notosusanto. 1979. *Pengantar Sejarah Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Nugroho, Garin dan Dyna Herlina S. 2015. *Krisis dan Paradoks Film Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- PERFIKI. 1993. *Mengenal Bioskop Keliling Lebih Jauh*. Jakarta : Glory Offset Jakarta.
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pranoto, Suhartono, W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riyanto, Bedjo. 2000. *Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial 1870-1915*. Yogyakarta: Tarawang.
- Siagian, Gayus. 2010. *Sejarah Film Indonesia: Masa Kelahiran- Pertumbuhan*. Jakarta: Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeth.
- Sumarno, Marselli. 1996. *Dasar-Dasar Apresiasi Film*. Jakarta: PT Grasindo.
- Suryapati, Akhli. 2010. *Hari Film Nasional (Tinjauan dan Retrospeksi)*. Jakarta: Direktorat Perfilman.
- Susanto, Budi (ed). 2005. *Penghibur(an) Masa Lalu dan Budaya Hidup Masa Kini Indonesia*. Jakarta: Kanisius.
- Susanto, Budi (ed). 2007. *Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Takashi, Shiraishi. 1997. *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat Di Jawa, 1912-1926*. Jakarta: PT Midas Surya.
- Tio, Jongki. tt. *Kota Semarang Dalam Kenangan*. Semarang: -.
- Tjasmadi, HM Johan dan SM Ardan. 1992. *Sejarah Bioskop*. Jakarta: Sinematek Indonesia.
- Tjasmadi, HM Johan. 2008. *Seratus Tahun Bioskop Indonesia 1900-2000*. Bandung : Megindo.
- , 2015. *60 Tahun Mengawal Bioskop dan Film Indonesia*. Jakarta : PWI.
- Wasino. 2007. *Dari Riset hingga Tulisan Sejarah*. Semarang: Unnes Press.
- Widja, I Gde. 1988. *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yusabiran, Misbach. 2009. *Sejarah Film 1900-1950 "Bikin Film Di Jawa"*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Artikel

- Erwantoro, Heru. 2014. *Bioskop Keliling Perannya dalam Memasyarakatkan Film Nasional dari Masa ke Masa*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung. Jurnal Patanjala Vol. 6 No. 2, Juni 2014.

Mitalia, Ghesa Ririan. 2012. *Dibalik Layar Perak: Film-Film Bioskop di Surabaya 1950-1970*. Universitas Airlangga. Jurnal Verleden Vol.1 No.1 Desember 2012.

Syafi'i, Rispa Achsin. 2016. *Dinamika Perbioskopian Kota Magelang Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan Tahun 1920-1960*. e-journal skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

Wawancara

Agus Priyo Hatmoko, 28 Februari 2017

Jongkie Tio, 1 Maret 2017

Tubagus P Svarajati, 6 Juni 2017

Djawahir Muhammad, 12 Juni 2017

